

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

SKRIPSI

Oleh

UDI KUNCORO



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCY AND APPLICATION OF LOCAL GOVERNMENT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (SIMDA) TO QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT

By

UDI KUNCORO

This study aims at finding out the effect human resource competency on quality of local government financial report and the effect application of local government management information system on quality of local government financial report.

This study belongs to quantitative research. The sample was determined by purposive sampling technique. The sample size in this study was 42. The data analysis was done by using multiple regression with the help of SPSS 22.0 software.

The result showed that human resource competency had a positive and significant effect on quality of local government financial report and application of local government management information system had a positive and significant effect on quality of local government financial report.

Keywords: human resource competency, application of local government management information system, quality of local government financial report.

ABSTRAK

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Oleh

UDI KUNCORO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pengaruh penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif.

Sample ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sample dalam penelitian ini sebanyak 42. Analisis data menggunakan regresi berganda dengan bantuan software SPSS 22.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumberdaya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan penerapan sistem informasi manajemen daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

Oleh

UDI KUNCORO

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

**Pada
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi

**: PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PENERAPAN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)
TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Nama Mahasiswa

: Udi Kuncoro

Nomor Pokok Mahasiswa : 1511031153

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

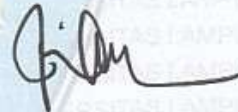
: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

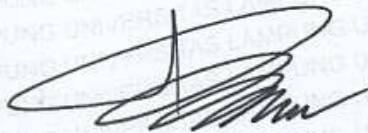


Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.
NIP 19750620 200012 2 001



Ninuk Dewi K, S.E., M.Sc., Akt.
NIP 19820220 200812 2 003

2. Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Farichah, S.E., M.Si., Ak.
NIP 196206121990102001

MENGESAHKAN

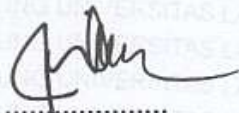
1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.



.....

Sekretaris : Ninuk Dewi K, S.E., M.Sc., Akt.



.....

Penguji Utama : Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. M. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 196109041987031011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 September 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan saya ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Oktober 2017
Penulis,



Udi Kuncoro
NPM 1511031153

RIWAYAT HIDUP

Udi Kuncoro, lahir di Banjarnegaea pada tanggal 16 Juli 1990 dari pasangan Bapak Mujimin dan Ibu Herlina, merupakan anak Pertama dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 4 Krandegan pada tahun 1996 dan lulus pada tahun 2002. Kemudian, penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Banjarnegara yang diselesaikan pada tahun 2005, lalu dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Banjarnegara hingga lulus pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan Diploma III Spesialisasi Penilai/PBB di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 penulis memulai karir sebagai Auditor Pelaksana pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau, sampai akhirnya pada tahun 2015 memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan sarjana di Jurusan Akuntansi Universitas Lampung melalui program *State Accountability Revitalization Project* (STAR) yang diselenggarakan oleh BPKP bekerja sama dengan *Asian Development Bank* (ADB).

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan anugerah dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia Dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu dan memberisemangat, dukungan, serta pemikiran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Retno Yuni Nur S., S.E., M.Sc., Akt., selaku dosen Pembimbing Akademik.
5. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., selaku dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, pengetahuan, nasihat, dukungan, pelajaran, pengalaman, serta pembelajaran diri yang telah diberikan selama proses penyusunan serta penyempurnaan skripsi.
6. Ibu Ninuk Dewi K, S.E., M.Sc., Akt. selaku Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, pengetahuan, nasihat, dukungan, pelajaran, pengalaman, serta pembelajaran diri yang telah diberikan selama proses penyusunan serta penyempurnaan skripsi.

7. Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt selaku Penguji Utama. Terima kasih atas masukan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan selama proses penyusunan serta penyempurnaan skripsi.
8. Seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas semua bimbingan, pengajaran, pelayanan, dan bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
9. Kedua orang tua, Bapak Mujimin. dan Ibu Herlina yang selalu memanjatkan doa serta selalu memberikan nasihat dan dukungan dalam menyelesaikan kuliah dan penyusunan skripsi di Universitas Lampung ini. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, kesabaran, dan segalanya yang tidak bisa ananda ungkapkan melalui kata-kata. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada Bapak Ibu di dunia dan akhirat.
10. Adikku, Anggita Arifiana, terima kasih selalu menjadi saudari terbaik, yang selalu mendukung dan memberikan doa dan semangat baik disaat susah maupun senang dan selalmemberikan dukungan moral sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada adikku.
11. Teman-teman seperjuangan, STAR BPKP Batch 2 Universitas Lampung, atas kebersamaan, bantuan, dan dukungan kalian selama menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada teman-teman *Winning Eleven* yang telah membantu dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan perkuliahan ketika penulis
13. Terimakasih untuk Johan Arief yang tanpa mengeluh ketika membantu penulis dalam setiap permasalahan ketika berkuliah di Universitas Lampung. Semoga kebaikanmu mendapatkan balasan dari Allah SWT.
14. Terimakasih untuk Arie Ryan dan Irfan Febriandi yang telah bersedia meminjamkan sepeda motor sehingga proses penyebaran kuesioner dapat terlaksana. Semoga sepeda motornya awet dan bisa bertahan sampai 5 tahun kedepan.
15. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala bentuk saran, kritik, dan masukan sangat diharapkan. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Oktober 2017

Penulis,

Udi Kuncoro

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Kompetensi Sumber Daya Manusia	8
2.1.2. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ...	13
2.1.2.1. Pengertian Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).....	13
2.1.2.2. Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).....	16
2.1.2.3. Klasifikasi SIMDA.....	16
2.1.2.4. Unsur SIMDA	17
2.1.3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17
2.1.3.1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17

2.1.3.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	18
2.1.3.3. Peranan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	21
2.1.3.4. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	23
2.2. Penelitian Terdahulu	24
2.3. Kerangka Pemikiran	26
2.4. Hipotesis	27
2.4.1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	27
2.4.2. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	30
3.2. Data Penelitian	30
3.3. Definisi Operasional Variabel	31
3.4. Skala Pengukuran Variabel	34
3.5. Jenis dan Sumber Data	34
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	35
3.7. Metode Analisis	35
3.7.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	35
3.7.2. Uji Asumsi Klasik	36
3.7.3. Uji Hipotesis	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Deskriptif Data Penelitian	41
4.2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	43
4.2.1. Variabel Kompetensi SDM	44
4.2.2. Variabel Penerapan SIMDA	44
4.2.3. Variabel Kualitas LKPD	45
4.3. Analisis Data.....	46
4.3.1. Uji Validitas	46
4.3.2. Uji Reliabilitas.....	47

4.4. Uji Asumsi Klasik	48
4.4.1. Uji Normalitas	48
4.4.2. Uji Multikolinieritas	49
4.4.3. Uji Heteroskedastisitas	49
4.4.4. Uji Autokorelasi	50
4.5. Pengujian Hipotesis	50
4.5.1. Analisis Regresi Linier Berganda	50
4.5.2. Uji <i>Adjusted R²</i> (Koefisien Determinasi)	52
4.5.3. Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik – F)	52
4.5.4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	53
4.6. Pembahasan Hasil Penelitian	54
4.6.1. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	54
4.6.2. Pengaruh Penerapan SIMDA terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Keterbatasan Penelitian	58
5.3. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu	25
2. Definisi Operasional Variabel Penelitian	33
3. Kriteria Autokorelasi	38
4. Rincian Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	41
5. Tingkat Pengembalian Kuesioner tiap Pemerintah Daerah	41
6. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
7. Responden Berdasarkan Usia	43
8. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	43
9. Statistik Deskriptif Kompetensi SDM.....	44
10. Statistik Deskriptif Penerapan SIMDA	44
11. Statistik Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	45
12. Uji Validitas Variabel Kompetensi SDM.....	46
13. Uji Validitas Variabel Penerapan SIMDA	46
14. Uji Validitas Variabel Kualitas LKPD	47
15. Hasil Uji Reliabilitas	48
16. Hasil Uji Normalitas	48
17. Hasil Uji Multikolinieritas.....	49
18. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	49
19. Hasil Perhitungan Analisis Linier Berganda	50
20. Hasil Uji Adjusted R ²	52
21. Hasil Uji Statistik –F	52
22. Hasil Uji Statistik –t	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner Penelitian.....Lampiran 1
2. Tabulasi Data.....Lampiran 2
3. Uji Validitas.....Lampiran 3
4. Uji HipotesisLampiran 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan menyediakan/memproduksi barang-barang publik. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Ulum, 2004). Organisasi sektor publik yang sering diidentikkan dengan pemerintahan atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya.

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Pemerintah adalah entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena : (a) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan kepemilikan sumber-sumber tersebut (Partono, 2000).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, tujuan laporan keuangan adalah

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi.

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

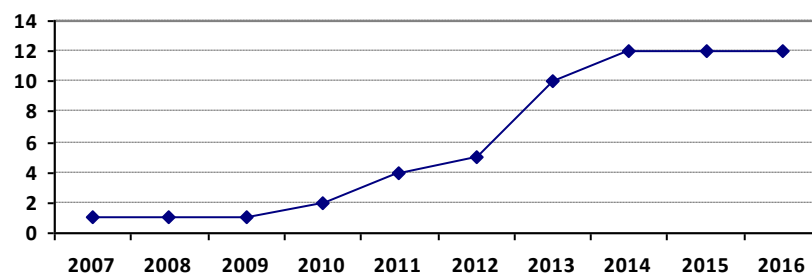
Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkompetensi, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkompetensi dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kemudian hal lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA Keuangan dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja.

BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai pengemban amanat pembina penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 mengembangkan SIMDA Keuangan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. SIMDA Keuangan merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja.

Dalam rangka mengemban amanat PP Nomor 56 Tahun 2005 untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan SIMDA Keuangan, namun belum semua pemerintah daerah di Provinsi Lampung telah menerapkan SIMDA Keuangan.

Tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya.



Grafik 1.1 Pengguna SIMDA di Provinsi Lampung

Dari 16 Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Lampung, 12 diantaranya sudah menerapkan SIMDA Keuangan. Diantaranya adalah Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran dan Kota Metro. Kabupaten/kota tersebut mengalami peningkatan opini BPK setelah menggunakan SIMDA.

Menurut Pulungan (2014) dalam penerapan SIMDA ditemui beberapa hambatan yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam penerapan aplikasinya yaitu kekurangpahaman para pemakai tentang computer, kekurangpahaman para spesialis bidang informasi tentang bisnis dan peran manajemen, relatif mahal nya harga perangkat computer; serta terlalu berambisinya para pengguna yang terlalu yakin dapat membangun sistem informasi secara lengkap sehingga dapat mendukung semua pihak yang berkepentingan.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Basukianto (2015) semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD. Adapun hasil penelitian dari Nurillah (2014) menunjukkan bahwa kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya penulis ingin melakukan penelitian dengan menggunakan pengukuran variabel penerapan SIMDA dengan dimensi yang berbeda, yaitu menggunakan model Model DeLone & McLean (2008). Model DeLone dan McLean dianggap dapat merefleksikan kesuksesan penerapan suatu Sistem Informasi Manajemen pada suatu organisasi/Instansi. Penulis akan melakukan penelitian pada pemerintah dengan judul **”PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan pada dasar memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Praktisi

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia di masa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta wacana kepada pihak SKPD dalam mengembangkan sumber daya, sistem akuntansi keuangan, teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintahan di Indonesia pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kata kompetensi berasal dari kata *competence* atau *competency*, yang berarti kecakapan, kemampuan, atau kewenangan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa kompetensi adalah kapasitas kemampuan, kecakapan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang sudah menjadi keahliannya. Dengan demikian ia dianggap kompeten atau berwenang dalam bidang pekerjaan tersebut. Jadi pekerjaan tersebut memang merupakan profesinya. Dengan demikian orang tersebut akan sukses dalam melaksanakan pekerjaannya apabila ditugaskan pada bidang kerjanya.

Spencer (1993) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi adalah bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang, serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Selain itu kompetensi adalah sesuatu yang menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja. Menurut Spencer (1993) bahwa kompetensi juga

sebenarnya memprediksi siapa yang berkinerja yang baik dan siapa yang berkinerja kurang baik, diukur dari kriteria atau standar yang digunakan.

Pengertian kompetensi oleh Spencer (1993) adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu.

Menurut Spencer (1993), beberapa karakteristik kompetensi terdiri dari:

- a. Watak (*traits*) yaitu yang membuat seseorang mempunyai sikap perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespon sesuatu dengan cara tertentu.
- b. Motif (*motive*), yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara konsisten dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan.
- c. Bawaan (*self-concept*), yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
- d. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu dan pada area tertentu.
- e. Keterampilan atau keahlian (*skill*), yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental.

Spencer mengemukakan bahwa apabila diaplikasikan dalam praktik organisasi, pegawai yang memiliki kompetensi yaitu individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan pekerjaannya sehingga dapat berperan aktif di tempat kerjanya.

Sebagaimana dijelaskan konsep kompetensi yang terkait dengan pekerjaan, pertama kali diangkat oleh McClelland pada tahun 1973, ia mempublikasikan paper berjudul

“Testing for Competence rather than Intelligence” yang mengemukakan latar belakang dan konsep kompetensi dalam psikologi modern. Dalam paper tersebut, ia melakukan kajian dan analisa berbagai penelitian sebelumnya, dan menyimpulkan bahwa pengukuran potensi intelegensi dan pengetahuan akademik dianggap kurang akurat untuk memprediksi prestasi kerja maupun keberhasilan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Disamping itu dikemukakan pula bahwa hasil psikotes dan nilai prestasi akademik yang diperoleh dari bangku sekolah dan perguruan tinggi seringkali diskriminatif terhadap gender, kelompok minoritas, ataupun menurut strata sosioekonomi. Hal ini memicu penelitian-penelitian baru untuk mencari metode-metode yang lebih baik untuk mengidentifikasi kemampuan profesional dan kemampuan individu di tempat kerja, yang kemudian disebut sebagai kemampuan atau kompetensi.

Menurut Fathoni (2006) Sumber Daya Manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga dan kemampuannya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu.

Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber

daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002).

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya manusia tersebut. Tanggungjawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan, deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Keterampilan adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa

kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil juga mendefinisikan mengenai unsur-unsur kompetensi teknis antara lain:

- a. Pengetahuan kerja adalah pengetahuan yang dimiliki pegawai negeri sipil berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.
- b. Keterampilan kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi:
 - 1) Keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (*task skill*)
 - 2) Keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan (*task management skill*)
 - 3) Keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang berbeda (*contigency management skill*)
 - 4) Keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja (*job/ role environment skill*)
 - 5) Keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/lingkungan kerja yang berbeda (*transfer skills*)

- c. Sikap kerja adalah perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ide awal dari penggunaan sistem kompetensi ini adalah sebagai alat penentu untuk memprediksikan keberhasilan kerja (kinerja). Namun dalam perkembangannya ternyata sistem ini bisa diaplikasikan untuk banyak hal, antara lain digunakan sebagai dasar dalam proses perencanaan, seleksi, suksesi, penilaian dan evaluasi kinerja, kompensasi, dan pengembangan sumber daya manusia lainnya. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka indikator variabel kompetensi dalam penelitian ini yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap serta perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Dalam pengukuran kompetensi SDM, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 ini sejalan dengan karakteristik kompetensi SDM yang telah dikemukakan oleh Spencer yaitu individu yang berkompeten harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan bidang tempatnya bekerja.

2.1.2 Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

2.1.2.1 Pengertian Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Sistem informasi manajemen dibentuk oleh tiga kata, yaitu sistem, informasi dan manajemen. Menurut Sutanta (2003) sistem adalah sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling kerjasama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Sutanto (2007) mendefinisikan informasi sebagai “hasil pengelolaan data yang memberikan arti dan manfaat. Manajemen didefinisikan oleh

Nugroho (2007) sebagai suatu tim yang disusun dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi.

Menurut Mcleod (2010) sistem informasi manajemen (SIM) merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama. Menurut Kumorotomo (2004) sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Lebih lanjut Kumorotomo (2004) menjelaskan bahwa unsur-unsur yang mewakili suatu sistem informasi secara umum adalah masukan (*input*), pengolahan (*processing*), dan keluaran (*output*).

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan (BPKP, 2008). SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan di setiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

Menurut DeLone (2008) terdapat beberapa dimensi yang dapat menggambarkan kesuksesan suatu penerapan sistem informasi, yaitu:

- a. Kualitas Sistem (*System Quality*) yaitu suatu karakteristik yang diharapkan dari sistem informasi tersebut. Sebagai contoh kemudahan penggunaan, fleksibilitas sistem, keandalan sistem dan kemudahan untuk dipelajari.
- b. Kualitas Informasi (*Information Quality*) yaitu karakteristik yang diharapkan dari output yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Sebagai contoh relevansi, mudah dipahami, akurat, ringkas, lengkap, dalam bentuk yang dapat dinilai dengan uang, runtut dan informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan
- c. Kualitas Pelayanan (*Service Quality*) yaitu kualitas pelayanan yang diterima pengguna sistem informasi dari pembuat sistem informasi tersebut. Sebagai contoh respon, keakuratan, keandalan, kompetensi teknis dan empati yang dimiliki oleh staff perawatan sistem informasi.
- d. Pemakaian Sistem (*System Use*) yaitu sejauh mana pengguna dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh sistem informasi. Sebagai contoh jumlah penggunaan, frekuensi penggunaan, ketepatan penggunaan yang lebih luas dan tujuan penggunaan.
- e. Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*) yaitu Tingkat kepuasan pengguna laporan, situs web, dan layanan pendukung.
- f. Manfaat yang diperoleh (*Net Benefit*) yaitu Sejauh mana IS berkontribusi Keberhasilan individu, kelompok, organisasi, Industri, dan negara. Sebagai contoh meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan penjualan, Pengurangan biaya, peningkatan keuntungan, efisiensi pasar, Kesejahteraan konsumen, penciptaan lapangan kerja, dan ekonomi Pengembangan.

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) adalah:

- a. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- b. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan *webcam* bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- c. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya;
- d. Sebagai media awal bagi pelaksanaan *e-governement*; dan
- e. Sebagai sarana untuk pelaksanaan *good governement*.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

- a. *Database* terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama;
- b. Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan
- c. *Fleksibel*, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:
 - 1) Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan
 - 2) Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.

2.1.2.3 Klasifikasi SIMDA

SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (BPKP, 2008), yaitu:

- a. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.

- b. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah.
- c. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/lembaga.

2.1.2.4 Unsur SIMDA

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP,2008), yaitu:

- a. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi, lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.
- b. Portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
- c. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
- d. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan labarugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai

cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakaiannya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitas.

2.1.3.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Menurut Soemars (2005) karakteristik yang harus melekat dalam informasi akuntansi sebagai berikut Dapat: dipahami, Relevan, Keandalan, dapat dibandingkan.

Harahap (2007) karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari Relevan, Dapat dimengerti, Daya uji, Netral, Tepat waktu, Daya banding, Lengkap.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Bagian kerangka konseptual akuntansi pemerintah pada paragraf 35 yang menyatakan bahwa terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: Relevan, Andal,

dapat dibandingkan, dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan apabila:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi

yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian Jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan

kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3.3 Peranan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Nilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antargenerasi (*international equity*). (SAP No 24 Tahun 2005).

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.1.3.4 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan relisasi dalam suatu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan operasional terdiri dari pendapatan laporan operasional, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

f. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang mempunyai karakteristik yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau panduan dalam penarikan

hipotesis dan pengujian hipotesis. Beberapa penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

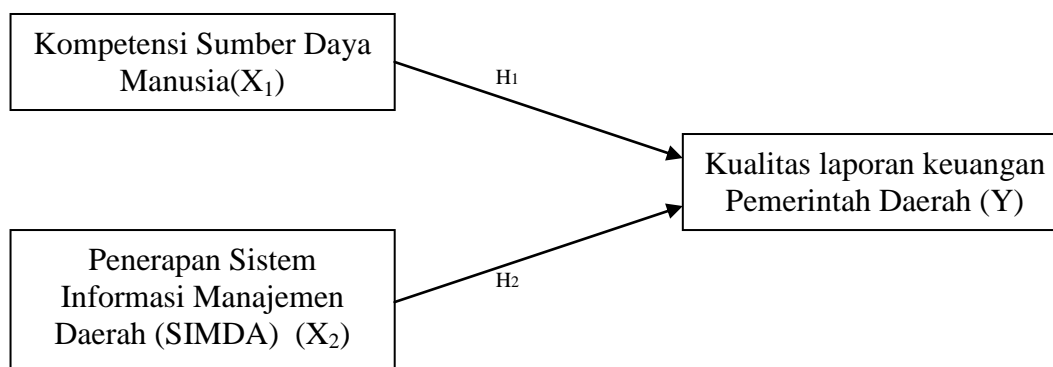
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati (2014)	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil pengujian hipotesis adalah kompetensi SDM, penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2	Assyifa Nurillah (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil pengujian hipotesis adalah kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
3	Febrian Cahyo Pradono dan Basukianto (2015)	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Keuangan Daerah (SAKD), Peran PPK-SKPD, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	a. Semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD b. Semakin baik teknologi informasi yang digunakan maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD c. Semakin baik pelaksanaan tugas PPK-SKPD maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD d. Semakin baik intensitas rekonsiliasi maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD e. Semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian pada landasan teori sebelumnya, maka kerangka pemikiran yang dibangun adalah terdapat dalam gambar di bawah ini yang menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

SDM merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompotensi tinggi (Sugeng, 2000).

Perka BKN Nomor 8 Tahun 2013 mendefinisikan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Jadi kompetensi yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan bahwa orang tersebut telah memiliki berbagai pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam penyelesaian tugas, dalam hal ini adalah penyelesaian laporan keuangan, dengan kompetensi yang memadai maka hasil laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas.

Penelitian Nurillah (2014), yang menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia di SKPD Kota Depok diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata

usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

Begitu juga dengan penelitian Pradono (2015) menemukan bukti empiris bahwa secara garis besar sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil hipotesis yaitu:

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.4.2 Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang

memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Grande (2011) mendefinisikan SIA sebagai alat yang dirancang untuk membantu dalam pengelolaan dan pengendalian topik yang terkait dengan bidang ekonomi serta keuangan perusahaan. Salehi (2010) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi meningkatkan kinerja individu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sejalan dengan pernyataan tersebut penggunaan SIMDA akan dapat mendorong dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, hal ini dikarenakan SIMDA dirancang untuk dapat membantu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Hal ini akan berdampak juga terhadap ketepatan waktu dalam penyelesaian laporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan Pradono (2015) memperlihatkan bahwa implementasi SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini berarti jika Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dapat diimplementasikan secara baik dan benar, maka akan mampu menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil hipotesis yaitu:

H₂ : Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian dengan desain kausal. Desain kausal berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel penelitian atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel memengaruhi variabel lain. Selanjutnya, tempat dilakukannya penelitian ini adalah pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran dan Kota Metro. Penelitian ini akan dilakukan atas responden yaitu pada pegawai/staf keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran dan Kota Metro.

3.2. Data Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Metro, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran.

2. Responden yang dipilih sebagai sampel

Sampel yang akan dipilih dalam penelitian ini merupakan pegawai yang bekerja di bidang keuangan di tiap SKPD yang ada di 3 Kabupaten/Kota tersebut.

3. Metode Pengambilan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dengan melakukan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana diambil 5 SKPD dengan anggaran terbesar di tiap Kabupaten/Kota.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data berupa kuesioner yang diukur dengan skala Likert lima poin.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel digunakan untuk menghindari kesalahan dalam membahas dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dan dapat dibagi dalam suatu batasan operasional antara lain :

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (X_1)

Kompetensi Sumber Daya Manusia SDM adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya (Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013). Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Pengetahuan kerja
- b. Keterampilan kerja
- c. Sikap kerja

2. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X_2)

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan (BPKP, 2008). Variabel implementasi (X_2) diukur dengan:

- a. *Access system quality*
- b. *Service quality*
- c. *System use*
- d. *Information quality*
- e. *User satisfaction*
- f. *Net benefit*

3. Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Variabel ini diukur menggunakan indikator:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Skala
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	Kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya (Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan kerja (Spencer, 1993) 2. Keterampilan kerja (Spencer, 1993) 3. Sikap kerja (Spencer, 1993) 	Likert
Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X ₂)	Program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan (BPKP, 2008)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>System quality</i> (DeLone and McLane, 2008) 2. <i>Service quality</i> (DeLone and McLane, 2008) 3. <i>System use</i> (DeLone and McLane, 2008) 4. <i>Access system quality</i> (DeLone and McLane, 2008) 5. <i>User Satisfaction</i> (DeLone and McLane, 2008) 6. <i>Net Benefit</i> (DeLone and McLane, 2008) 	Likert
Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan (Soemarso, 2005) 2. Andal (Soemarso, 2005) 3. Dapat dibandingkan (Soemarso, 2005) 4. Dapat dipahami (Soemarso, 2005) 	Likert

3.4. Skala Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan skala Likert. Menurut Siregar (2013), skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Penelitian ini menggunakan kuesioner berskala likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban dengan pengukuran variabel adalah:

- a. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5
- b. Jawaban Setuju (S) diberi skor 4
- c. Jawaban Ragu-Ragu (RR) diberi skor 3
- d. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
- e. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

3.5. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperlukan untuk pengujian hipotesis yang telah ditetapkan, sedangkan Data sekunder diperlukan untuk memberikan gambaran (deskripsi) terhadap obyek penelitian.

Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung tanpa perantara orang atau lembaga lain sebagai pihak ketiga. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan responden.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui orang lain yang berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder ini diperoleh melalui cara studi dokumenter yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen organisasi.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, maka teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, melakukan penelitian dengan pengamatan langsung dengan cara mendekati objek yang akan diteliti.
- b. Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengkaji dokumen-dokumen perusahaan yang menjadi subyek penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- c. Kuisisioner, disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup atau pernyataan yang diajukan kepada responden. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data deskriptif yang dikuantifikasikan dan akan digunakan untuk menguji hipotesis dengan model kajian skala likert dengan lima alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan atau pernyataan yang diajukan dalam daftar kuisisioner.

3.7. Metode Analisis

3.7.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Untuk mengetahui tingkat kesahihan atau kevalidan dari suatu instrumen, maka dilakukan pengujian validitas instrumen terlebih dahulu. Menurut Ghazali (2016) uji validitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Pengambilan keputusannya bahwa setiap indikator valid apabila nilai r_{hitung} lebih besar atau sama dengan r_{tabel} . Untuk menentukan nilai r_{hitung} , dibantu dengan program SPSS

yang dinyatakan dengan nilai *Coorrected Item-Total Correlation*. Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka kuisioner valid
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka kuisioner tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menurut Ghozali (2016) adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Cara menghitung tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach*. Reliabilitas merupakan tingkat keandalan alat ukur (kuisioner). Kuisioner yang reliabel adalah kuisioner yang apabila dicobakan berulang-ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama, cara mengukurnya dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dimana pada pengujian reliabilitas ini menggunakan bantuan komputer program SPSS. Jika nilai *Cronbach Alpha* pada kuisioner $> 0,6$ maka variabel tersebut dinyatakan reliabel (Ghozali, 2016).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu menggunakan Uji Kolmogorof-Smirnov (Uji K-S), grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot. Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S $>$ dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya itu uji normalitas. Sedangkan melalui pola penyebaran PPlot dan

grafik histogram, yakni jika pola penyebaran memiliki garis normal maka dapat dikatakan data berdistribusi normal (Ghozali, 2016).

2. Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali (2016) uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai tolerance. Jika $VIF > 10$ dan nilai tolerance $< 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2016).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antar anggota sampel atau data pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu, sehingga munculnya suatu data pengamatan dipengaruhi oleh data sebelumnya (Ghozali, 2016). Dalam

penelitian ini bila terjadi Autokorelasi, berarti kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah selain dipengaruhi oleh variabel independen juga dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada periode sebelumnya.

Tabel 3.2 Kriteria Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi, positif, dan negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$

Sumber : Ghozali, 2016

3.7.3 Uji Hipotesis

a. Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Analisis kuantitatif yang dilakukan berdasarkan data primer yang diperoleh dari penyebaran instrumen (daftar pertanyaan) kepada sampel, dan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Rumus yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah persamaan regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y	=	Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah
a	=	Konstanta
b_{12}	=	Koefisien regresi
X_1	=	Kompetensi Sumber Daya Manusia
X_2	=	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
e	=	Faktor kesalahan

b. Uji Adjusted R^2

Koefisien determinasi (*adjusted R²*) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai *adjusted R²* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

c. Uji t

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Uji yang dilakukan adalah uji t. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan tingkat signifikansi dimana yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Jika tingkat signifikansi > 0,05

maka hipotesis ditolak. Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima (Ghozali, 2016).

d. Uji F

Pengujian secara keseluruhan dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi layak atau tidak untuk digunakan. Pengujian ini menggunakan uji statistik-F. Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\text{Sig.} \leq 5\%$), maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah layak. Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($\text{Sig.} > 5\%$), maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak layak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kompetensi yang baik dari para pegawai yang ada di pemerintah daerah, khususnya bagian keuangan akan menghasilkan kinerja yang baik juga dalam hal ini berbentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan tujuan dari penerapan SIMDA yaitu untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya. Kesuksesan penerapannya juga telah dapat diukur dengan menggunakan model DeLone & McLean (2008).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, meskipun demikian masih terdapat keterbatasan yaitu :

1. Panjangnya proses permintaan ijin penelitian di masing- masing kabupaten yang membuat waktu yang dibutuhkan dalam pengembalian kuesioner penelitian kurang optimal.
2. Dalam penelitian ini menggunakan analisa regresi berganda dengan alat ukur SPSS dan variabel laten yang diteliti diasumsikan dapat diukur secara langsung. Metode ini memiliki kekurangan yaitu kemungkinan timbulnya kesalahan pengukuran yang diakibatkan oleh variabel laten yang diasumsikan dapat langsung diukur.
3. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang membuat peneliti tidak dapat mengawasi kebenaran dari jawaban atas pernyataan.
4. Penelitian ini hanya menguji kemampuan pegawai di tiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dengan menggunakan kompetensi dan penerapan SIMDA. Hal ini didukung dari hasil uji *adjusted R square* yang tidak melebihi 50%.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka disarankan:

1. Bagi Kabupaten/Kota
 - a. Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki pegawainya dengan mengadakan berbagai pendidikan dan pelatihan terutama di bidang keuangan.
 - b. Pemerintah daerah harus meningkatkan kemampuan pegawainya dalam penggunaan SIMDA sehingga pemanfaatannya akan lebih maksimal. Salah satunya dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan terkait SIMDA baik secara mandiri seperti yang telah dilakukan oleh Kota Metro ataupun dengan meminta pendampingan dari BPKP selaku pembuat aplikasi SIMDA.
2. Bagi peneliti selanjutnya:
 - a. Penelitian selanjutnya harus memperhatikan waktu yang tepat dalam penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner dapat dilakukan disaat ada pelatihan-pelatihan yang melibatkan seluruh SKPD.
 - b. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan alat ukur *Structural Equation Modeling* (SEM) dalam pengolahan data yang diperoleh dari responden. Hal ini dikarenakan SEM lebih cocok digunakan untuk mengukur variabel laten.
 - c. Penelitian selanjutnya sebaiknya ditambahkan teknik wawancara bersamaan dengan saat menyebarkan kuesioner sehingga dapat mengawasi pengisian kuesioner oleh responden.

- d. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel penelitian lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak ada dalam penelitian ini sebagai contoh penerapan SPIP dan pelaksanaan internal audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Sutanto. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi pertama. Bandung: Lingga Jaya.
- Badan Kepegawaian Negara. 2013. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2008. Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>. (diakset tanggal 22 Maret 2017)
- Cahyo, Febrian & Basukianto. 2015. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 22, No. 2. ISSN: 1412-3126.
- DeLone, William H. , McLean, Ephraim R. 2008. The DeLone and McLean Model of Information System Success : A Ten-Year Update. *Journal of Management Information System*, Vol. 19 No. 4 pp. 9 – 30.
- Edhy Sutanta. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grande, E. U., R. P. Estébanez, dan C. M. Colomina. 2011. The Impact of Accounting Information Systems (AIS) on Performance Measures: Empirical Evidence in Spanish SMEs. *The International Journal of Digital Accounting Research*. Vol.11.
- Harahap, Sofyan Safri, 2007. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Edisi I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kumorotomo, W dan Margono, S.A. 2004. *Sistem Informasi Manajemen, Dalam Organisasi-organisasi Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Mardiasmo. 2002. *Ekonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- McClelland, David C. 1973. Testing for Competence Rather than Intelligence. *American Psychologist*, Vol 28(1), Jan 1973, 1-14.
- McLeod, Raymond Jr., dan George P. Schell. 2010. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Indeks.
- Nurillah, Assyifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol.1,No.1.Hal: 2337-3806.
- Partono. 2000. *Laporan Keuangan Pemerintah: Upaya Menuju Transparansi dan Akuntabilitas*. Media Akuntansi.PT. Reflika Aditama.
- Pulungan, M. Soleh. 2014. Optimalisasi Simda Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Yang Lebih Berkualitas. *Jurnal Bina Praja*. Volume 6 Nomor 4 Edisi Desember 2014: 269 – 282.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- _____. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Salehi, M., V. Rostami, dan A. Mogadam. 2010. Usefulness of accounting information system in emerging economy: empirical evidence of Iran. *International Journal of Economics and Finance*. Vol.2 No.2 (May).
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

- Soemarso S.R. 2005. *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Kelima (Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Spencer, Peter M., dan Signe M. Spencer. 1993. *Competence at Work "Model for Superior Performance"*. New York: Jhon Wiley & Sons Inc.
- Sugeng, Imam. 2000. Mengukur dan Mengelola Intellectual Capital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 15 No. 2, hal 247-256.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Ulum, Ihyaul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: UMM PRESS.
- Wati, Kadek Desiana, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2 No. 1, Hal 171-176